

SKRIPSI
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGANAN
UNJUK RASA DI KOTA MAKASSAR



OLEH
NURFADLILAH FAJRIANI
B 111 11 024

BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGANAN
UNJUK RASA DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

NURFADLILAH FAJRIANI

B 111 11 024

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Masyarakat dan
Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENANGANAN UNJUK RASA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

NURFADLILAH FAJRIANI

B111 11 024

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 04 Februari 2016
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Sekretaris



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : NURFADLILAH FAJRIANI

Nomor Pokok : B111 11 024

Bagian : Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan Unjuk
Rasa Di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2016

Pembimbing I



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Pembimbing II



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

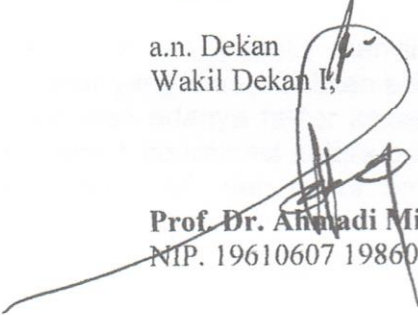
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NURFADLILAH FAJRIANI**
No. Pokok : B111 11 024
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan
Unjuk Rasa Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Nurfadlilah Fajriani (B111 11 024), *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan Unjuk Rasa Di Kota Makassar*, dibimbing oleh Wiwie Heryani dan Ratnawati.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya unjuk rasa yang berujung anarkis serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani unjuk rasa anarkis dalam aspek sosiologi hukum di Kota Makassar.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab atau pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskripsi.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pengunjuk rasa berbuat anarkis antara lain disebabkan adanya faktor kekecewaan, faktor kesengajaan (rekayasa), faktor kurang koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian, faktor sosiologi, dan faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat kepolisian.

(2) Upaya dalam penanganan aksi unjuk rasa, aparat mengedepankan beberapa strategi, antara lain: Adaya Upaya Pre-Emtif (pemberian himbauan dan arahan) agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa. Kemudian Upaya Preventif (tindakan pengamanan dan pencegahan) yang dimaksudkan agar pihak aparat penegak hukum baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak aparat dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu aksi unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak aksi unjuk rasa tersebut. Serta Upaya Represif (tindakan tegas), dimana tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan aparat yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara professional, proposional, dan tanpa ragu-ragu serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

Nurfadlilah Fajriani (B111 11 024), *Review of Sociology of Law on the Handling of Demonstration in Makassar city*, guided by Wiwie Heryani and Ratnawati.

The purpose of this research was to find out the factors that contribute to the demonstration that led to anarchy and the efforts made by law enforcement officials in handling anarchist demonstrations in the aspect of sociology of law in Makassar city.

This research is a field research where collection of data was conducted through direct and open interviews in the form of question and answer or related parties relating to the cases in this research. In addition, the writer also conducted literature research that is to find, inventory, note, and study secondary data related to the issues discussed in this research. Furthermore, the result data was analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the analysis of the results of the research, the writer conclude several things, among others: (1) the factors that cause the protesters do anarchists partly due to disappointment factor, intentional factor (engineering), lack of coordination between the protesters and the police factor, sociology factor, and low capacity of crowd control by the police factor. (2) Effort in handling the demonstration, the police put forward several strategies, among others: the effort of pre-emptive (giving appeal and direction) so that the demonstration may be running in orderly and avoid things that harm the public and inform early to the relevant agencies which to be targeted of demonstration. Then preventive effort (security and prevention action); which meant that the law enforcement officer of both individual and unit in taking action was not deemed excessive by the public. The police in taking action must be careful in seeing the possibilities that can occur in a demonstration in order to minimize the danger or threat from the impact of the demonstration. As well as the effort of repressive (decisive action), where decisive and measurable action is a series of police action undertaken by national police member, both individual and in the bond of unity in a professional, proportionate, and without hesitation and in accordance with the regulation of legislation which is applicable.

KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*hirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang merupakan satu-satunya *Illah* (sesembahan) yang *Haq* untuk disembah, dan satu-satunya Dzat yang penuh dengan cinta dan kemuliaan. Karena dengan cinta-Nya-lah sehingga menunjuki penulis *Ad-Dien* (agama) ini, agama yang *Rahmat*alil 'alamin dan agama yang penuh dengan kemuliaan, yang senantiasa berlandaskan iman dan takwa, yang kemudian memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir, pada jenjang studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dan tak lupa pula penulis kirimkan salam dan shalawat kepada Baginda "Nabiullah Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, yang dimana Beliau merupakan sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia, pelita dalam kegelapan zaman, dan penyempurna akhlak manusia. Tidak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada para keluarga Beliau (Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam), istri-istri Beliau, sahabiyah, tabi'in, at-tabi'ut at-tabi'in, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Ad-Dien ini dengan tetap menjalankan sunnah-sunnah Beliau dari bangun tidur hingga tidurnya kita kembali,

hingga takdir-takdir Allah berlaku kepada diri-diri mereka hingga akhir zaman. *Aamiin.. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Sesungguhnya barangsiapa yang diberikan petunjuk (hidayah) oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang mampu memberikannya petunjuk (hidayah), dan sesungguhnya janji Allah itu benar.

Melalui tulisan ini pula, penulis ingin menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang senantiasa memberikan senyuman terindahya kepada penulis yang menjadi suntikan energi bagi penulis sehingga penulis tetap semangat dalam merampungkan skripsi ini.

Terimakasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya pula penulis rasakan atas Karunia terindah yang ditakdirkan kepada penulis dari Allah subhanahu wata'ala, yaitu berupa Orang tua yang menjadi Malaikat penulis yang begitu mencintai penulis, yang setiap kesuksesan yang penulis raih adalah buah dari do'a-do'a tulus yang keluar dari lisan-lisan Malaikat penulis, Ibunda tercinta Nuraeni yang telah melahirkan penulis ke dunia ini dengan penuh perjuangan dan pengorbanan yang tulus antara hidup dan matinya, dan Ayahanda tersayang Ir. Syamsuddin Usman (Alm) yang telah mendukung dan membimbing setiap pilihan penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga Beliau lebih dulu datang menghadapNYA, dan sesungguhnya Beliau tidak pernah pergi meninggalkan penulis sebab Beliau akan senantiasa tetap ada didalam

hati penulis yang paling dalam, karena dengan skenario Allah sesungguhnya tidak ada pula perpisahan penulis dengan Beliau, melainkan Allah hanya menunda waktu penulis dengan Beliau untuk dapat kembali bersama di *Jannah Firdaus*-NYA kelak. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan mereka, didunia maupun diakhirat kelak. *Aamiin, Aamiin, Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Terimakasih yang sebesar-besarnya pula penulis haturkan kepada Kakek H.M. Dg. Manggolle (Alm), Nenek Hj. S. Dg. Ngugi, serta kepada Paman Abdul Azis, S.H., M.H yang telah merawat, membesarkan, membimbing, mendidik, dan membiayai segala keperluan penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang hingga penulis tumbuh menjadi dewasa seperti sekarang ini, segala apa yang telah mereka berikan, tidak dapat penulis membalasnya dalam bentuk apapun itu selain do'a yang tulus untuk mereka, tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Saudara-saudari penulis yang senantiasa penulis cintai karena Allah, Kakak penulis Nur Azilah Furqani, S.Pd, dan Adik-adik penulis Nur Aulia Fauziani, Muhammad Ainul Rifky, dan Nur Muchlisa Rezkiyani dan juga kepada Kakak-kakak sepupu penulis Ritnawati, S.T., M.T; Muh. Makbul Anshari, ST., M.Si; Hana, SE; Arsiady Arifin, SH; Afriani Arifin, Amd. Keb, dan Muhammad Fahrul Syatir, S.Pd., M.Pd, yang telah banyak membantu, memberikan kritikan dan saran kepada penulis serta menjadi sponsor dalam pelaksanaan ujian akhir penulis, terimakasih juga kepada Kakak-kakak sepupu penulis lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu

persatu, serta kepada keluarga besar penulis yang penulis cintai karena Allah, *jazakillah khair* atas motivasi dan do'anya.

Terimakasih pula penulis haturkan yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitas Beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ratnawati, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa menyempatkan waktu dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji, Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, dan Ibu Rastiawati Gunawan, S.H., M.H atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik atas waktu yang dicurahkan kepada penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi, dan tentunya segala ilmu yang diberikan kepada penulis adalah harga yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan karyawan, khususnya pegawai bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
9. Bapak Briпка Yulianto selaku Waka Bagian Intelkam Polrestabes Makassar, Bapak Brippol Ahmad Yusuf selaku anggota Bagian Intelkam Polrestabes Makassar, dan Bapak Briпка Riski selaku Bintara Sub. Bagian Hukum Polrestabes Makassar yang telah membantu penulis memberikan data-data selama penelitian yang berkaitan dengan masalah skripsi penulis, serta memotifasi penulis untuk terus mendalami ilmu hukum.
10. Adik Faris Ahmad Alamri sebagai pelaku pemanah Wakapolrestabes dalam kasus unjuk rasa anarkis yang terjadi di UNM pada tanggal 13 November 2014 dan kepada beberapa adik-adik mahasiswa UNM yang terkait dalam aksi unjuk rasa anarkis di UNM yang telah membantu penulis selama penelitian dengan

memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam merampungkan skripsi penulis.

11. Kakak-kakak senior Andi Imran, S.Pd., M.T; Budi Satria Junaedi, Mutmainnah Maggu, S.H., M.H; Andi Manja, S.H; Istikhariyah Muin, S.H; Umi Khaerah Pati, S.H., M.H; Ayu Wandira, S.H., M.Kn; Widya Alimuddin, S.H; Sitti Zam-Zam, S.H; Arwini Muslimah, S.H dan Ria Rezky Muhajir yang telah menyemagati serta mendo'akan penulis dalam merampungkan skripsi ini.
12. Teman-teman penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas, terkhusus pada teman angkatan penulis, angkatan 2011 (Mediasi) yang selalu berkesan dihati penulis. Teman-teman seperjuangan penulis di UKM LD Asy-Syari'ah FH-UH Dinar Al-Qadri, S.H; Icha Satriani Azis, S.H; A. Rachmi Dwi Putri; dan Dian Cahya Sari, SH yang telah penulis anggap sebagai saudari penulis sendiri, yang selalu membawa semangat dan keceriaan serta memberikan do'a selama perkuliahan dan dalam merampungkan skripsi ini.
13. Murabbiah-murabbiah penulis, Kanda Siti Mutmainnah, S.H., M.Kn; Kanda Nurnaningsih Hamzah, S.Hut., M.Hut; dan kepada Ustadzah Rosmila Dewi, S.Pd yang begitu semangat dalam berdakwah guna menegakkan kalimat Tauhid dimuka bumi ini, serta yang begitu sabar, lembut, bijak, tulus dan kecintaan mereka dalam mendidik dan membimbing penulis selama ini dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada penulis, mereka adalah

perantara-perantara Allah dalam penulis meraih dan menjemput hidayahNYA, semoga Allah senantiasa merahmati dan mencurahkan magfirahNya kepada Murabbiah-murabbiahku semuanya, uhibbukifillah.

14. Teman-teman Halaqah Penulis, Kanda Denji Kamma; Ukhti Rahmah, S.Gz; Fitriani, S.Pt; Musdalifah, S.KH; Mery Anggraeni, S.ST; Sukmawati M. Thaya; Sitti Nurung; Nurcahyani; Nurhayani; Adinda Nurjannah; Nurhikmawati; Yuliaty Ningsih; Ma'rifah; Marwah; Ramlah; dan Rissa, yang senantiasa terus memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
15. Adik-adik pengurus UKM LD ASY-SYARI'AH FHUH, adinda Ayuzahra Sanusi; Iin Iryani; Rahmi Utami; Rahmi Firdasari dan segenap pengurus UKM LD AS-SYARI'AH MPM FHUH dan FSUA yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tetap semangat dalam jalan dakwah, karena jalan dakwah adalah jalan yang terjal. Sekiranya dakwah itu mudah maka akan banyak orang yang akan menggelutinya, namun kemudian Allah memilih diri-diri kita sebagai penerus risalah Ilahi, oleh karena itu jadilah semangat yang tak pernah padam.
16. Ibu dan Kakak Perpustakaan FHUH, serta Bapak Amming selaku Satpam FHUH dan beberapa rekannya, yang senantiasa selalu menanyakan penyelesaian studi penulis dan senantiasa memberikan semangat serta do'a kepada penulis.

Dalam merampungkan skripsi ini penulis telah mencurahkan segala kemampuan penulis. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wata'ala. Sebagai makhluk ciptaanNya, penulis memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritikan yang membangun senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan penulis dapat menjadi lebih baik lagi. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Semoga Allah subhanahu wata'ala merahmati segala apa yang penulis lakukan, dan menjadikan segala bentuk upaya dalam merampungkan skripsi ini sebagai suatu bentuk ibadah kepadaNYA. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama mahasiswa yang ingin mendalami hukum masyarakat dan pembangunan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
A. Pengantar Sosiologi Hukum	8
B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	17
C. Objek Kajian Sosiologi Hukum	20
D. Teori-teori Sosiologi Hukum	21

E. Pengertian Unjuk Rasa	23
F. Pengertian Anarkis	29
G. Asas dan Tujuan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	30
H. Hak dan Kewajiban Negara dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	31
I. Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis di Kota Makassar	41
B. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Unjuk Rasa Anarkis di Kota Makassar	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah Unjuk Rasa di Kota Makassar Tahun 2013-2015	44
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, konsekuensi logis sebagai suatu Negara yang mengikrarkan dirinya sebagai suatu Negara hukum adalah bahwa segala aturan yang berlaku harus mencerminkan adanya penegakan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia ini sendiri merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia masih berada didalam kandungan, hak yang lahir secara kodrati yang tidak dapat diambil, dirampas, ataupun dicabut keberadaannya, sebab hak ini juga merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhlukNya sebagai makhluk yang sempurna diciptakannya, dengan dianugerahkannya hak tersebut pada setiap individu, maka setiap diri masing-masing individu wajib untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, selain itu hak asasi manusia juga merupakan salah satu pilar dalam bernegara yang memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga Negara untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka termasuk didalamnya hak untuk menyuarakan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang berbunyi:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara

lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Bangsa.

Selain pada Pasal 23 Ayat (2), kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan indikator adanya peningkatan proses keterbukaan di Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu konsekuensi logis Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan.

Salah satu pilar keterbukaan dalam bidang hukum berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat pada ketentuan mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen IV), yang berbunyi:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Selain pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen IV), kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat juga diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Ayat (2) “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati

nuraninya". Ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Perwujudan kehendak rakyat secara bebas dalam menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial yaitu dimana keberadaan masyarakat tidak lagi saling menjaga kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling menjelek-jelekkan hingga menimbulkan kehancuran, tetapi harus dapat menjamin rasa aman dan nyaman serta hidup yang rukun dalam bermasyarakat.

Oleh karena itu, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batas-batas, rambu-rambu, dan asas-asas hukum internasional yang diakui seluruh bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

3. Hak-hak dan kebebasan ini sama sekali tidak dapat dijalankan secara bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, merupakan peraturan perundang-undang yang bersifat regulatif sehingga disatu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen IV), serta Pasal 28E Ayat (2) dan (3), disisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan baik secara fisik maupun psikis yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam bidang hukum. Namun dalam kenyataannya, gelombang unjuk rasa yang terjadi diberbagai tempat khususnya di Kota Makassar, tidak lagi memperhatikan rambu-rambu dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terkadang disertai dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta menimbulkan perasaan tidak aman pada masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi, oleh karenanya memungkinkan rakyat dapat secara bebas menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Salah satu cara yang dilakukan guna untuk menyampaikan aspirasi tersebut adalah berupa unjuk rasa. Aktifitas seperti ini merupakan suatu bentuk protes warga masyarakat kepada pemerintah akan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan keinginan rakyat yang memicu protes dimana-mana, tidak jarang kita temui aksi seperti ini berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Jatuhnya korban pada saat unjuk rasa telah menjadi suatu momok yang menakutkan karena telah mencederai hukum di Indonesia, dalam hal ini Kota Makassar merupakan salah satu Kota yang paling sering terjadi kasus unjuk rasa tersebut, sebab Kota Makassar adalah salah satu kota Metropolitan yang sudah menjadi pemandangan yang lumrah jika terjadi aksi-aksi anarkis dalam suatu aksi unjuk rasa. Salah satu contoh unjuk rasa yang berakhir anarkis di Kota Makassar yaitu dalam kasus Penolakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tanggal 13 November 2014, yang berbunyi:

Aksi unjuk rasa dalam Penolakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), mengakibatkan banyak fasilitas kampus yang hancur, dan adapula polisi yang terluka akibat tembakan anak panah dari seorang mahasiswa, serta adanya sembilan wartawan yang terkena pukulan aparat kepolisian. Hal ini sangat disayangkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar karena seyogiannya aparat penegak hukum ini harus dapat melindungi, tetapi justru malah menjadi monster, demikian pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, terkait peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau *World Press Freedom Day (WPFD)* dibawah jembatan layang Urip Sumoharjo, pada tanggal 03 Mei 2015. (www.clebesonline.com/2015/05/04/polrestabes-makassar-tidak-serius-tangani-kasus-unm). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 10.45 Wita.

Unjuk rasa anarkis, dapat dipahami sebagai luapan kegalauan masyarakat atas ambiguitis perilaku pemerintah. Sikap-sikap anarkis dalam berunjuk rasa juga timbul dari perilaku aparat yang lebih menomorsatukan kekerasan untuk meredam massa ketimbang mempergunakan pendekatan dialogis.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan seputar penyimpangan dalam penyampaian pendapat dimuka umum guna terciptanya sistem demokrasi yang sebagaimana mestinya, yaitu berupa penegakan hak-hak pribadi seperti dalam unjuk rasa namun tidak mencederai aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka adapun beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya unjuk rasa yang berujung anarkis di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani unjuk rasa anarkis di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya unjuk rasa yang berujung anarkis di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani unjuk rasa anarkis di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi segenap civitas akademika fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa bagian hukum masyarakat dan pembangunan pada khususnya, serta menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Diharapkan melalui tulisan ini, penanganan unjuk rasa anarkis di Kota Makassar dapat ditangani secara lebih profesional oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, aman, dan terkendali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang berkembang pesat pada abad kedua puluh, meskipun cikal bakalnya sudah ada sejak pertengahan abad ke-19, sebagaimana Donald Black (dalam Satjipto Raharjo, 2002: 19), yang merupakan seorang sosiolog hukum yang berasal dari USA, mengemukakan pendapatnya bahwa abad kedua puluh merupakan abad sosiologi (*the age of sociology*).

Philip Selznick (dalam T.O. Ihromi, 1984: 27), mengemukakan bahwa sosiologi hukum pada awalnya berkembang sebagai hasil dari pemikiran para ahli hukum mengenai segi kemasyarakatan dari hukum. Ahli hukum seperti Rudolf von Jhering, Eugen Ehrlich merasakan kebutuhan untuk meninjau hal-hal yang lebih luas jangkauannya dari yang yuridis saja dan dalam tinjauan mereka segi-segi tersebut diperhatikan. Orientasi demikian, yang dalam ilmu hukum dianggap sebagai aliran sosiologis dalam teori hukum, juga dipengaruhi oleh para penulis dibidang sosiologi Emile Durkheim, Max Weber, E.A. Ross, dan W.G. Sumner, tetapi perkembangan sosiologi hukum itu sendiri, pada mulanya muncul dikalangan ahli hukum dari masyarakat Eropa.

Peran dari ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai persoalan hukum merupakan suatu fenomena yang sangat jelas kelihatan didalam

masyarakat, dalam hal ini banyak persoalan hukum dewasa ini yang tidak puas jika hanya diselesaikan dalam sektor hukum secara normatif, karena jika persoalan hukum hanya diselesaikan dalam pendekatan hukum normatif saja maka keadilan akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan adanya pendekatan komprehensif, dan sangatlah diperlukan ilmu sosiologi untuk dapat memecahkan berbagai persoalan hukum yang ada atau dihadapi oleh masyarakat.

Munir Fuady, 2011: 2, mengemukakan bahwa apabila berbicara mengenai ilmu sosiologi, maka ilmu sosiologi ini merupakan induk dari segala ilmu yang berkenaan dengan kemasyarakatan, sementara ilmu hukum juga berbicara tentang nilai-nilai luhur (seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan) yang harus dimiliki oleh masyarakat. Dalam memberikan suatu keadilan, maka ilmu sosiologi hukum sangatlah diperlukan dalam masyarakat yang terjebak dalam kasus hukum, agar persoalan didalam masyarakat tidak hanya menjadi seperti lubang yang menganga, tanpa adanya penyelesaian yang memuaskan, terutama dalam kacamata masyarakat umum.

Kemudian, sebelum lebih jauh membahas tentang sosiologi hukum, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian sosiologi hukum itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya seorang professor terkemuka dibidang sosiologi hukum sekaligus sebagai kritikus terhadap sosiologi jurisprudensi (*sociologi jurisprudence*) yang berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut

mendefinisikan sebagai berikut, George Gurvitc (dalam Sabian Utsman, 2009: 116):

Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dari pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaharuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum). Sosiologi hukum menafsirkan kelakuan dan manifestasi material hukum ini menurut makna batinnya. Sosiologi hukum khususnya bertindak dari pola hukum ke lambang yang ditetapkan sebelumnya, seperti hukum, prosedur dan sanksi-sanksi yang terorganisasi, sampai pada lambang-lambang hukum semata-mata, seperti peraturan yang mudah menyesuaikan diri dan hukum yang serta-merta. Dari yang tersebut belakangan ini sosiologi hukum bertindak kepada nilai dan gagasan hukum, dan kepada kepercayaan serta lembaga-lembaga kolektif yang bercita-citakan nilai ini dan memahami gagasan-gagasan ini, dan yang mewujudkan dirinya dalam fakta-fakta normatif yang serta-merta, sumber kesahan (*validity*), yakni keabsahan dari kepositifan segala hukum.

Defenisi sosiologi hukum juga tidak luput dari pemikiran Soerjono

Soekanto (dalam Achmad Ali, 1998: 57), yaitu:

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang berdiri sendiri, atau merupakan ilmu sosial yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial mengenai kehidupan atau pergaulan hidup, singkatnya bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat.

Adapun menurut Satjipto Raharjo (dalam Zainuddin Ali, 2006:10),

juga mendefenisikan sosiologi hukum, yaitu:

Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Kemudian menurut R. Otje Salman (dalam Zainuddin Ali, 2006: 10)

mendefenisikan sosiologi hukum, yaitu:

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Sosiologi hukum lazimnya dimulai dengan sikap “kecurigaan intelektual”, yaitu tidak mau begitu saja mempercayai dan menerima pernyataan-pernyataan hukum, apakah itu dalam bentuk peraturan ataupun keputusan-keputusan pengadilan. Sosiologi hukum, misalnya tidak menerima begitu saja bahwa hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Pertanyaan kritis dirinya adalah, “apakah hukum itu sendiri tidak mungkin pula menyimpang dan menimbulkan konflik?”.

Studi-studi sosiologi pada suatu ketika bisa menyingkapkan, bahwa suatu peraturan yang berisi penyelesaian konflik, tetapi sesungguhnya bersifat semu, dibelakang hari malah bisa meledakkan konflik baru. Perspektif organisasi dari sosiologi hukum juga menyingkapkan sekalipun hukum itu menyediakan janji-janji kepada orang-orang tertentu, janji-janji itu lebih bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian, antara hukum dan pengorganisasian terdapat suatu hubungan. Kemampuan untuk mengorganisasikan diri yang demikian itu ternyata bergantung pula dari beberapa faktor seperti “prestise sosial” dari suatu kelompok, hal ini diungkapkan oleh Schuyt (dalam Satjipto Rahardjo, 1991: 329).

Kemudian apabila kita berbicara mengenai pengertian sosiologi hukum, maka tentunya kita berbicara mengenai kajian sosiologi hukum, dimana Menurut Achmad Ali (1998: 9), kajian sosiologi hukum adalah

suatu kajian sosiologi yang objeknya adalah fenomena hukum, tetapi menggunakan optik atau kacamata ilmu sosial dan teori-teori sosiologi, pendekatan yang dipakai dalam sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu-ilmu hukum lainnya, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum objeknya adalah hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun kacamata yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap objek tadi.

Salah satu prinsip yang dianut oleh kajian sosiologi hukum adalah pandangannya bahwa hukum itu tidak otonom. Seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (dalam Achmad Ali, 1998: 51), hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakat.

Beranjak dari apa yang telah dikemukakan oleh Satjipto Raharjo maka kita harus dapat memahami bahwa hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Pada umumnya pengetahuan akan hukum memusatkan perhatian akan aturan-aturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataannya diwujudkan oleh masyarakat satu sama lain, maka untuk pengembangan hukum dan

pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus tetap memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat.

Menurut Achmad Ali (1998: 51), bahwa hukum dan segala pranata yang berkaitan dengan hukum bukanlah “makhluk planet mars” yang tiba-tiba kesar dan terjatuh ke bumi dan terlepas dari berbagai pengaruh yang sifatnya membumi. Jadi, tampak perbedaannya dengan pandangan kaum dogmatik-normatif yang senantiasa memandang hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri dan karena itu seolah-olah hukum terlepas dari lingkungan sosialnya.

Sosiologi hukum utamanya menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, (Achmad Ali, 1998: 34). Hal ini menekankan bahwa pentingnya peran dari ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai persoalan hukum merupakan suatu fenomena yang sangat jelas kelihatan. Banyak persoalan hukum dewasa ini sudah tidak lagi memuaskan jika hanya diselesaikan oleh sektor hukum secara normatif. Karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif. (Munir Fuady, 2011: 2).

Sosiologi hukum diantaranya mempelajari “pengorganisasian sosial hukum”. Objek sasaran-sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya.

Polisi merupakan salah satu diantara objek studi sosiologis hukum yang amat menarik. Daya tarik disini disebabkan oleh karena bidang kerja polisi memberikan kesempatan yang sangat luas bagi metode pendekatan interpretatif. Disatu pihak polisi dituntut untuk menjalankan hukum, yang berarti terikat pada prosedur-prosedur hukum yang ketat, sedangkan dilain pihak, ia adalah jabatan yang harus menjaga ketertiban. Adapun pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI), menyatakan bahwa:

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 Ayat (1), sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam hal tersebut mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi, terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI), yang berbunyi:

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo (2009: 111), mengatakan bahwa Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Berkaitan dengan penegakan ketertiban, maka itu tidak dapat lepas dari tugas kepolisian, dimana tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI), yaitu:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tugas pokok sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI), adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun jika kita melihat dari sudut pandang sosiologi hukum, polisi juga dapat bertindak sekaligus sebagai hakim, jaksa, dan bahkan bisa juga menjadi pembuat undang-undang. Dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam kedudukan yang demikian itulah ia bisa menjadi hakim dan sebagainya sekaligus, sekalipun semua itu hanya dalam garis-garis besarnya saja.

Bagaimanapun juga, sosiologi hukum senantiasa berusaha untuk memferifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal tertentu kedalam tingkah laku orang-orang yang menjalankannya. Tingkah laku yang nyata inilah yang diketahui oleh

hukum dan bukan rumusan normatif formal dari hukum yang diambil dari dunia penyelenggara hukum, sekedar sebagai peragaan tentang bagaimana orang memandang hukum dan menganggapnya sebagai sudut ilmu tersebut.

B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Karakteristik sosiologi hukum dapat dilihat dari pendekatan-pendekatan yang digunakan, ada 3 (tiga) macam pendekatan yang dapat digunakan dalam fenomena hukum dalam masyarakat, sesuai dengan pendapat Achmad Ali (1998: 34), adalah: (1) pendekatan moral, (2) pendekatan ilmu hukum, (3) pendekatan sosiologis.

Adapun kajian sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali (2006: 35), adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), dan (4) prediksi. Berikut diuraikan beberapa karakteristik sosiologi hukum, yaitu:

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibedakan ke dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana menerapkannya”: Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku

orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji keshahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu?” Bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan disini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Menurut Roscoe Pound (dalam Achmad Ali, 2009: 33), bahwa

karakteristik dari kajian sosiologi dibidang hukum adalah:

- a. Kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari institusi hukum maupun doktrin hukum. Kemudian bahwa kajian sosiologis berhubungan dengan kajian hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum, tetapi tidak cukup hanya merupakan hal terpenting adalah studi tentang

pengoperasian kemasyarakatan pada undang-undang tersebut serta berbagai efek yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut.

- b. Titik berat dari perhatian pound adalah bahwa kajian para sosiologi hukum itu ditujukan untuk bagaimana membuat aturan hukum menjadi lebih efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan dimasa silam. Bukan merupakan semata-mata kajian tentang doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan tetapi apa efek sosial dari segala doktrin hukum yang telah dihasilkan dimasa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Kepada kita bagaimana hukum dimasa lalu tumbuh di luar dari kondisi sosial, ekonomis, dan psikologis.
- c. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntut umum bagi hakim, yang menentukan hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara para pihak dengan alasan umum dari masyarakat pada umumnya. Akhirnya, pound menitik beratkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Adapun beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis, menurut Satjipto Raharjo (1991: 326), yaitu:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum apabila praktek-praktek itu dibeda-bedakan kedalam undang-undang, penerapan, dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji keshahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah “bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu?, apakah kenyataan itu memang seperti yang tertera pada bunyi peraturan?”.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan perbedaan terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada pemberian penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

C. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Achmad Ali dan Wiwie Heryani (2012: 13-14) mengemukakan objek utama dari kajian sosiologi hukum secara garis besar, adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black (dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012: 13) sebagai *government social control*. Dalam hal ini, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna meletakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturannya dapat terwujud, oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan saksi eksternal (yaitu, sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara).
- b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
- c. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum.
- d. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik diantara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direayasa, dalam arti

direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Kemudian menurut Gerald Turkel (dalam Achmad Ali, 2009: 61), pendekatan sosiologis juga mengenal studi tentang hubungan antara hukum dan moral serta logika internal hukum, antara lain:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- b. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *"the social world"* mereka.
- c. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi hukum.
- d. Bagaimana hukum dibuat.
- e. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

D. Teori-teori Sosiologi Hukum

1. Teori Perubahan Sosial: Adanya perubahan sosial ini, tentunya sangatlah dipengaruhi oleh faktor kondisi-kondisi teknologis dan ekonomis. Dimana kondisi-kondisi tersebut yang dianggapnya sebagai dasar dari organisasi-organisasi sosial maupun nilai-nilai. Karena itu nilai-nilai yang merupakan hasil situasi-situasi teknologis dan ekonomis merupakan pula titik tolak yang harus dipelajari terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial. Willian F. Ouhburn (dalam Achmad Ali, 1998: 295).
2. Teori Ketaatan Hukum: Berkenaan dengan maraknya fenomena yang tidak sesuai dengan harapan yang ada, maka hal ini sangatlah berkaitan erat dengan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H. C Kelman (dalam Achmad Ali dan Wiwie

Heryani, 2012: 142), yang membaginya ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu aturan hanya takut terhadap sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

3. Teori Kekerasan Kolektif (*Collective Behaviour*): Didalam masyarakat adanya ketidakotonoman hukum atau kemandirian hukum sebagaimana yang dianut oleh kaum dogmatik, yang berarti hukum mempunyai pengaruh timbal balik dari berbagai aspek, salah satu contohnya yaitu aspek ketertiban. Didalam suatu ketertiban ini, maka sering kita jumpai suatu tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, kemudian sering kita jumpai didalam pelanggaran terjadi suatu kejahatan kekerasan. Dimana Clinard & Quenny (dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012: 51), menggolongkan kejahatan kekerasan terbagi atas dua jenis, yaitu: (1) kejahatan kekerasan perorangan, dan (2) kejahatan kekerasan kolektif. Kejahatan kekerasan kolektif inilah merupakan kejahatan yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian dalam suatu bentuk tawuran ataupun perkelahian.

Kemudian, menurut Smelser (dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012: 53), berpandangan bahwa asas-asas yang harus ada terhadap suatu tindakan kelompok mencakup:

- a. Gerakan yang berorientasi nilai, yang dimobilisasi melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang mengharapkan perumusan ulang nilai-nilai tertentu.
- b. Gerakan yang berorientasi norma, yang dimobilisasi melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang mengharapkan perumusan ulang norma-norma tertentu.
- c. Berwujud ledakan kebencian yang dimobilisasi melalui tindakan kolektif atas nama kepercayaan umum yang menuntut tanggung jawab suatu pranata terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diinginkan.
- d. Tindakan gila-gilaan dan kepanikan merupakan bentuk-bentuk tingkah laku yang didasarkan oleh suatu redefinisi umum terhadap fasilitas yang sifatnya situasional.

E. Pengertian Unjuk Rasa

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh Bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.

Terlepas dari maksud dibalik pemahaman itu, maka mahasiswa tetap mempunyai andil yang besar dalam sejarah Indonesia. Diakui atau tidak, mahasiswa adalah pelaku perubahan sosial yang terdepan karena mereka adalah kelompok manusia yang cerdas, pandai, cekatan, dan paling bertanggung jawab terhadap perbaikan keadaan, mengingat masa depan adalah garapan mahasiswa.

Menurut Alpian Hamzah, dkk. (1998: 8) bahwa:

Gerakan demonstrasi boleh dibilang mengandung dua macam bentuk secara bersamaan:

Pertama, menyumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam Bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa dibalik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu.

Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis. Pokoknya suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang tertib, aman, dan damai.

Hak menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa:

1. Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Unjuk rasa yang digerakkan oleh massa dari rasa ketidakpuasan dan kekecewaan atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan

diberbagai bidang, seperti dibidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Seiring dengan bergulirnya era reformasi dan demokratisasi, unjuk rasa terhadap kebijakan yang timpang dan dinilai tidak berpihak kepada rakyat hampir terjadi diseluruh pelosok kota dan tidak saja dimotori oleh kekuatan mahasiswa tetapi bahkan oleh hampir seluruh elemen masyarakat, baik dari LSM, buruh, guru, dan lain-lainnya. Sebagian aksi massa ini memiliki ciri yang sama, agresif, emosional, tidak rasional, dan tidak terkendali.

Jika unjuk rasa masyarakat disuatu tempat berjalan dengan tertib dan teratur, maka ditempat lain terjadi bentrokan fisik antara pengunjuk rasa dengan aparat penegak hukum. Diseluruh dunia, hampir tidak ada benua yang pada suatu atau lain waktu tampaknya luput dari gejala unjuk rasa yang penuh luapan emosi, yang terkadang dibarengi dengan bermacam-macam cara. Kekuatan-kekutan yang telah menarik keluar ibarat magnet raksasa, dari seluruh pelosok kota dari puluhan, ratusan, hingga ribuan manusia dan dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, usia, yang kebanyakan tidak pernah saling mengenal satu sama lain, lalu membentuknya kedalam suatu gerombolan yang mengikatnya dan membentuknya menjadi satu makhluk raksasa, bersatu semangat, bersatu jiwa, bersatu suara, bersatu gerak, berbondong-bondong mengikuti gerak-gerik dalam aspirasi mereka, itulah gerakan unjuk rasa.

Eric Hoffer (1998: 8), secara berani mendalilkan bahwa semua gerakan massa seperti unjuk rasa, tidak peduli apa sifatnya (agamawi, rasial, sosial, nasional, atau ekonomis), dan terkadang juga tidak peduli apa masalahnya, namun memiliki karakteristik tertentu yang sama, karakteristik yang semuanya mampu membangkitkan pada diri anggotanya kerelaan untuk berkorban, kecenderungan untuk bereaksi secara kompak, fanatisme, harapan berapi-api, dan kebencian. Semua gerakan tersebut, betapapun berbeda dalam doktrin dan aspirasinya, menarik pengikut-pengikutnya, yakni manusia-manusia yang kecewa dan tidak puas, atau frustrasi. Orang-orang frustrasi menurut Hoffer, adalah orang yang sedang mengalami rasa kekecewaan dalam berbagai kegagalan, merasa hidupnya tersia-siakan, rusak, hancur tidak tertolong, dan tidak ada harapan lagi. Tipe orang-orang seperti inilah yang merupakan penggerak pertama dari gerakan unjuk rasa anarkis.

Yap Thiam Hiem (dalam Eric Hoffer, 1998: 14), mengatakan bahwa jika kita bertolak dari kenyataan bahwa para pengunjuk rasa terutama terdiri dari orang yang kecewa, tidak puas, dan bahwa mereka terlibat atas kemauan sendiri, maka disini diandaikan, bahwa: (1) rasa kecewa dan tidak puas itu sendiri dapat muncul tanpa dorongan dari luar, melahirkan sifat-sifat khas; (2) teknik paling ampuh untuk mempengaruhi orang pada dasarnya adalah menanamkan sampai kuat, berakar semua bibit tingkah laku, dan berbagai reaksi yang sudah ada dalam jiwa orang yang kecewa dan tidak puas itu.

Selanjutnya Eric Hoffer (1998: 11), mengatakan bahwa ada gerakan unjuk rasa yang baik. Ini memang fakta yang tepat, karena bila semua gerakan unjuk rasa mempunyai sifat dan maksud negatif, maka pasti semua pemerintah diseluruh dunia sudah tentu dan akan melarangnya. Pemerintah dari negara-negara barat misalnya, mengerti bahwa unjuk rasa tidak jarang mempunyai tuntutan yang sah dan benar, juga merupakan realisasi manusia untuk mengutarakan pendapat yang perlu dijamin, hanya saja bagaimana menyalurkan dan mengawasi gerakan tersebut agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.

Mendukung pandangan Hoffer, kita dapat mengatakan bahwa unjuk rasa merupakan gejala universal di zaman modern ini. Dunia mengenal berbagai revolusi yang digerakkan agama, nasionalisme, atau kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi yang menuntut reformasi, kemerdekaan, keadilan, peningkatan, dan jaminan martabat serta harkat manusia perorangan atau kelompok.

Kemudian apabila kita berpijak pada teori sosiologi, kasus unjuk rasa yang dipelopori oleh berbagai elemen atau kelompok masyarakat tampaknya dapat digolongkan kedalam kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Berbagai macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur, pada dasarnya dapat dimasukkan kedalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik (Soerjono Soekanto, 2005: 144).

Setiap kenyataannya adanya manusia berkumpul, sampai batas-batas tertentu menunjukkan adanya suatu ikatan sosial tertentu.

Walaupun mereka saling berjumpa dan berada disuatu tempat secara kebetulan, namun kesadaran akan adanya orang lain telah membuktikan bahwa ada ikatan semacam ikatan sosial. Kesadaran tersebut menimbulkan peluang-peluang untuk dapat ikut merasakan perasaan orang lain yang berada ditempat yang sama. Artinya, suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi belaka, tetapi juga karena adanya pusat perhatian yang sama.

Sebagaimana halnya dengan kerumunan (*crowd*), ukuran utama dari adanya unjuk rasa adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Unjuk rasa tersebut akan segera selesai apabila orang-orangnya telah bubar, dan karena itu unjuk rasa merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara (*temporer*).

Perbedaannya hanya pada adanya bentuk yang terorganisir, mempunyai pimpinan, akan tetapi tidak menekankan pada sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, interaksi didalamnya bersifat spontan dan kehadiran orang-orang yang berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama, sebab identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang yang bersangkutan ikut serta dalam suatu unjuk rasa.

Dalam batas tertentu, oleh Soerjono Soekanto (2005: 144) mengemukakan bahwa, unjuk rasa dapat dikategorikan sebagai kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowd*) atau kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*).

Kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Biasanya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya keadilan.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan sementara secara umum, mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya unjuk rasa, adalah sebagai berikut: (1) adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dibidang sosial, politik, dan ekonomi, atau karena saluran demokrasi yang tersendat; (2) sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat; (3) tidak dihormatinya lagi norma-norma adat setempat.

F. Pengertian Anarkis

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Anarkis” artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang-orang yang melakukan tindakan anarki, sedangkan kata “Anarki” berarti hal tidak adanya Pemerintah, Undang-Undang (UU), Peraturan, atau Ketertiban dan Kekacauan (dalam suatu Negara).

Anarkis dan anarkisme memiliki kata dasar “Anarki”. Ini merupakan serapan berbahasa Inggris dari kata *anarchy*, ataupun serapan dari Bahasa Belanda, Jerman, serta Perancis dari kata *anarchie*, dimana

keseluruhannya memiliki akar kata dari Bahasa Yunani berupa kata *anarchos* ataupun kata *anarchein*.

Secara etimologi kata anarkis, *anarchy*, *anarchie*, *anarchos*, dan *anarchein* merupakan kata bentukan “an” dan “archos.” Serupa dengan istilah “un” pada Bahasa Inggris, “an” memiliki defenisi tidak, tanpa, ataupun nihil. Sedangkan *archos* atau *archein* adalah kata yang memiliki arti pemerintah ataupun kekuasaan.

Anarchos dan *anarchein* dapat disama-artikan dengan “tanpa pemerintahan”. Anarkis sendiri adalah orang/manusia yang mempercayai adanya anarki, sementara “isme” berarti ajaran, ideologi, ataupun paham tentang anarki.

Jadi menurut pemaparan diatas, anarkisme adalah suatu paham yang memercayai bahwa segala bentuk negara serta pemerintahan (dengan kekuasaannya) merupakan lembaga yang menumbuh kembangkan penindasan terhadap kehidupan. (<http://ensiklo.com/2014/08/apa-arti-anarki-anarkis-bukanlah-tindak-kekerasan-dan-perusakan/>). Diakses pada tanggal 20 Desember 2015, Pukul 16.57 Wita.

G. Asas dan Tujuan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan kemerdekaan secara bebas dan bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dimana kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4 mengenai Asas dan Tujuan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan pada:

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. asas musyawarah dan mufakat;
- c. asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. asas proporsionalitas; dan
- e. asas manfaat.

Kemudian adapun tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, diatur berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

H. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diatur pula Hak

dan Kewajiban Warga Negara dalam menyampaikan pendapatnya pada Pasal (5), (6), (7), dan (8).

Warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berdasarkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Menyampaikan pendapat dimuka umum, meskipun diatur dalam pasal sebelumnya, tetapi setiap warga Negara yang menyampaikan pendapatnya dimuka umum, harus tetap berkewajiban dan bertanggung jawab, sebagaimana kewajiban dan pertanggung jawabannya diatur dan harus tetap berdasarkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diantaranya:

- a. menghormati hak-hak orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga Negara, tidak hanya warga Negara saja yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan aspirasi atau pendapatnya dimuka umum, melainkan aparaturnya juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana kewajiban dan tanggung jawabnya diatur berdasarkan, Pasal 7 Undang-undang Nomor 9 Tahun

1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
yaitu:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyalahgunakan pengamanan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun

1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
yang berbunyi:

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

I. Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya

Manusia merupakan *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup dan berkembang tanpa manusia lain, ini menandakan bahwa dalam kehidupan seorang manusia akan selalu ada interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, namun kemudian interaksi yang terjalin ini tidak selamanya berjalan lancar sehingga memungkinkan munculnya suatu ekses (masalah) oleh karena itulah kemudian lahirlah suatu ungkapan yang mensyaratkan bahwa “manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, dan mati diantar oleh hukum” yang artinya bahwa segala lini kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya aturan hukum. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat termasuk pula di dalamnya karena harus kita sadari bahwa kebebasan yang dimaksud bukanlah bebas yang sebebaskan-bebasnya namun

kebebasan yang terkontrol, untuk itu kebebasan menyampaikan pendapat yang dimaksudkan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen IV) Pasal 28, kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Beberapa tahun terakhir ini, kata unjuk rasa makin marak terdengar. Entah itu dari perkotaan, daerah sub urban maupun di perkampungan kecil. Kata itu menjadi semakin populer walau mungkin tak banyak yang mengetahui arti harfianya selain “ramai-ramai turun ke jalan”.

Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto dan masuknya era reformasi, penyampaian pendapat dimuka umum semakin mendapat tempat. Kehidupan demokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat paham akan hak-haknya untuk dapat menyampaikan pendapat secara terbuka dan berani. Namun hal ini-pun membawa berbagai dampak, selain tersampainya kehendak rakyat secara langsung, tidak jarang justru menimbulkan tindak anarkis dan kerusuhan massal yang menimbulkan kerugian jiwa, moril, dan materil akibat euforia massa.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat tersebut diperlukan suasana yang aman, tertib, dan damai. Untuk mewujudkannya, pemerintah Habibie pada masa itu mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, yang sifatnya regulatif atau mengatur bagi setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya dimuka umum, tentu dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra, disatu pihak menganggap hal ini baik demi ketertiban, namun dipihak lain justru dianggap membatasi kebebasan itu sendiri.

Sebelum berlakunya Undang-undang ini, setiap penyampaian pendapat dimuka umum selalu dihadapi secara represif oleh aparat keamanan, bahkan semua penyampaian pendapat dan keinginan masyarakat secara perorangan ataupun kelompok sangat dibatasi dan selalu berbenturan dengan berbagai ketentuan yang berpihak kepada pemerintahan, misalnya yang termuat dalam KUH Pidana Pasal 510 Ayat (1), (2), dan Pasal 511 bahwa untuk mengadakan keramaian, arak-arakan di jalan umum yang dilakukan untuk menyatakan keinginan tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain akan dikenakan sanksi kurungan penjara atau denda.

Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap penyampaian pendapat tidak lagi dilarang, melainkan diatur pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, perlindungan hukum yang konsisten dan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi warga negara dan kehidupan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah:

1. Unjuk rasa atau Demonstrasi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
2. Pawai, yakni cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum, yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas, yakni kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini memiliki kemiripan dengan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1998 yang dikeluarkan sebelumnya. Hanya pada bagian tertentu saja yang mengalami perubahan, yakni jumlah peserta tidak lagi dibatasi sebanyak 50 (lima puluh) orang melainkan diatur setiap 100 (seratus) orang harus ada 1 (satu) orang sampai 5 (lima) orang penanggung jawab.

Adapun tata cara penyampaian pendapat dimuka umum menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian pendapat dimuka umum dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. Di lingkungan Istana Presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
 - b. Pada hari besar Nasional.

2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
3. Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
4. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
5. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
6. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.
7. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polri tersebut, memuat:
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Tempat, lokasi, dan rute;
 - c. Waktu dan lama;
 - d. Bentuk;
 - e. Penanggung jawab;
 - f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
 - g. Alat peraga yang digunakan;
 - h. Jumlah peserta.
8. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
9. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 (lima) orang penanggung jawab.
10. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
 - a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab menyampaikan pendapat di muka umum;
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan menyampaikan pendapat.
 - d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
11. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum.
12. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
13. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Ketentuan yang berlaku didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini sangat diharapkan dapat mengatur dan menertibkan setiap kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum sehingga tidak merugikan pihak lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi penelitian pertama adalah Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar. Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar merupakan instansi yang berwenang untuk menangani segala perkara yang berhadapan dengan hukum, termasuk diantaranya perkara unjuk rasa anarki. Kemudian, lokasi penelitian kedua adalah di Universitas Negeri Makassar (UNM), mengingat lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi kejadian unjuk rasa yang berujung anarkis di Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab atau pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini.
- b. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis di Kota Makassar.

Unjuk rasa merupakan sebuah simbol bahwa setiap warga Negara mempunyai kebebasan berekspresi. Dengan cara unjuk rasa itulah setiap warga bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Dalam artian unjuk rasa merupakan perwujudan partisipasi pendapat rakyat dalam pemerintahan dan menjadi kontrol atas penyelenggaraan Negara oleh wakil rakyat. Unjuk rasa menjadi penting sebab merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia yang diperlukan adanya suasana yang tertib, aman, dan damai dan haruslah dilakukan secara bertanggung jawab.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi dan demokratisasi, unjuk rasa terhadap kebijakan yang timpang dan dinilai tidak berpihak kepada rakyat hampir terjadi diseluruh pelosok kota dan tidak saja dimotori oleh kekuatan mahasiswa tetapi bahkan oleh hampir seluruh elemen masyarakat, baik dari LSM, buruh, guru, dan lain-lainnya. Sebagian aksi massa ini memiliki ciri yang sama, agresif, emosional, tidak rasional, dan tidak terkendali.

Eric Hoffer (1998: 8), secara berani mendalilkan bahwa semua gerakan massa seperti unjuk rasa, tidak peduli apa sifatnya (agamawi, rasial, sosial, nasional, atau ekonomis), dan terkadang juga tidak peduli apa masalahnya, namun memiliki karakteristik tertentu yang sama, karakteristik yang semuanya mampu membangkitkan pada diri anggotanya kerelaan untuk berkorban, kecenderungan untuk bereaksi secara kompak, fanatisme, harapan berapi-api, dan kebencian. Semua gerakan tersebut, betapapun berbeda dalam doktrin dan aspirasinya, menarik pengikut-pengikutnya, yakni manusia-manusia yang kecewa dan tidak puas, atau frustrasi. Orang-orang frustrasi menurut Hoffer, adalah orang yang sedang mengalami rasa kekecewaan dalam berbagai kegagalan, merasa hidupnya tersia-siakan, rusak, hancur tidak tertolong, dan tidak ada harapan lagi. Tipe orang-orang seperti inilah yang merupakan penggerak pertama dari gerakan unjuk rasa anarkis.

Mendukung pandangan Hoffer, kita dapat mengatakan bahwa unjuk rasa merupakan gejala universal di zaman modern ini. Dunia mengenal berbagai revolusi yang digerakkan agama, nasionalisme, atau kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi yang menuntut reformasi, kemerdekaan, keadilan, peningkatan, dan jaminan martabat serta harkat manusia perorangan atau kelompok.

Sebagaimana halnya dengan kerumunan (*crowd*), ukuran utama dari adanya unjuk rasa adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Unjuk rasa tersebut akan segera selesai apabila orang-orangnya telah bubar,

dan karena itu unjuk rasa merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara (*temporer*). Perbedaannya hanya pada adanya bentuk yang terorganisir, mempunyai pimpinan, akan tetapi tidak menekankan pada sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, interaksi didalamnya bersifat spontan dan kehadiran orang-orang yang berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama, sebab identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang yang bersangkutan ikut serta dalam suatu unjuk rasa.

Dalam batas tertentu, oleh Soerjono Soekanto (2005: 144) mengemukakan bahwa, unjuk rasa dapat dikategorikan sebagai kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowd*) atau kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*). Kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Biasanya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya keadilan.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berpendapat dapat sementara secara umum, mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya unjuk rasa, adalah sebagai berikut: (1) adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dibidang sosial, politik, dan ekonomi, atau karena saluran demokrasi yang tersendat; (2) sangat kurangnya perhatian pemerintah

terhadap ekonomi rakyat; (3) tidak dihormatinya lagi norma-norma adat setempat.

Kota Makassar merupakan salah satu Kota Metropolitan di Indonesia yang paling sering terjadi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis disetiap tahunnya, sebagaimana berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar, bahwa ada beberapa kasus unjuk rasa yang berakhir damai dan berujung anarkis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang terjadi di Kota Makassar, seperti pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Unjuk Rasa di Kota Makassar Tahun 2013-2015

Tahun	Damai	Anarkis
2013 (Januari – Desember)	31	15
2014 (Januari – Desember)	36	18
2015 (Januari – Oktober)	70	5
Total	137	38

Sumber: Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar

Dari tabel tersebut diatas, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya ada 175 (seratus tujuh puluh lima) total kasus unjuk rasa yang terjadi di Kota Makassar pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dimana pada tahun 2013-2015 terdapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) kasus unjuk rasa yang berakhir damai di Kota Makassar, dan pada tahun yang sama 2013-

2015 terdapat 38 (tiga puluh delapan) unjuk rasa yang berujung anarkis yang terjadi di Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan dari tabel tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dengan melihat presentase jumlah kasus unjuk rasa dari tahun 2013-2015, sebagaimana sepanjang tahun 2013-2015 maka jumlah unjuk rasa yang berakhir damai lebih banyak daripada unjuk rasa yang berujung anarkis yang terjadi di Kota Makassar.

Dibalik unjuk rasa anarkis (unras) yang terjadi di Kota Makassar, maka dalam hal ini, tentunya ada faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadinya aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis di Kota Makassar, sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 17 November 2015, di Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar bagian Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan) oleh Yulianto, mengatakan bahwa tata cara unjuk rasa yang kerap terjadi di Kota Makassar pada awalnya (sebelum melakukan unjuk rasa) sudah sesuai dengan tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. Di lingkungan Istana Presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
 - b. Pada hari besar Nasional.

2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
3. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
4. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
5. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
6. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.
7. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polri tersebut, memuat:
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Tempat, lokasi, dan rute;
 - c. Waktu dan lama;
 - d. Bentuk;
 - e. Penanggung jawab;
 - f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
 - g. Alat peraga yang digunakan;
 - h. Jumlah peserta.
8. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
9. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 (lima) orang penanggung jawab.
10. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
 - a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab menyampaikan pendapat di muka umum;
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan menyampaikan pendapat.
 - d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
11. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
12. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
13. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Namun realitas dilapangan, tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum sangatlah berbeda atau bertolak belakang dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga realitas unjuk rasa dilapangan kerap terjadi anarkis. Berikut faktor-faktor yang mendorong terjadi unjuk rasa yang berujung anarkis yang dikemukakan oleh Yulianto (Wawancara, 17-November-2015):

1. Unjuk rasa yang dilakukan melewati batas jam ketentuan pelaksanaan unjuk rasa dari jam 06.00-18.00 Wita.
2. Tidak mau mendengar birokrasi kampus dan pihak aparat.
3. Tidak memiliki surat pemberitahuan.
4. Tidak menerima tindakan aparat apabila mengambil rekannya yang terbukti melakukan unjuk rasa anarkis, mereka yang tidak menerima sehingga menyerang balik aparat kepolisian.
5. Adanya penyusup yang memprovokasi.
6. Budaya orang Makassar (polisi, mahasiswa, dan masyarakat sama-sama memiliki ego yang keras).

Selain itu, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa dikota Makassar, menurut Faris Ahmad Alamri (Wawancara, 23 November 2015) selaku terdakwa penembakan anak panah yang mengenai Wakapolrestabes pada aksi unjuk rasa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berakhir anarkis pada tanggal 13 November 2014 yang penulis wawancarai di Lapas Alauddin Makassar, serta beberapa pula rekannya yang penulis wawancarai di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), dalam hal ini

mereka mengemukakan alasan-alasan melakukan unjuk rasa yang berujung anarkis, antara lain :

1. Adanya rasa kekecewaan pemerintah.
2. Panggilan nurani atas perilaku aparat yang brutal dalam mengamankan aksi unjuk rasa.
3. Adanya kepentingan bersama dan rasa soildaritas.
4. Ajakan dari lembaga atau senioritas.

Beranjak dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Yulianto dan Faris Ahmad Alamri serta beberapa rekannya, terkait dengan faktor-faktor tersebut maka penulis memaparkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kekecewaan.

Hal yang mendasar yang menyebabkan terjadinya aksi anarkis dan perusakan yang dilakukan oleh para aksi unjuk rasa adalah faktor kekecewaan yang diakibatkan oleh pemerintah yang mereka anggap tidak mempedulikan aspirasi yang mereka bawa. Faktor Inilah yang menyulut kemarahan para aksi unjuk rasa, karena besar harapan mereka terhadap aksi yang mereka lakukan untuk adanya sebuah perubahan, sehingga tindakan anarkis serta merusak fasilitas yang berhubungan dengan kepemilikan pemerintahan dianggap relevan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

2. Faktor Kesengajaan (Rekayasa).

Faktor rekayasa merupakan kesengajaan yang dibuat oleh pihak tertentu (penyusup) sebagai provokator karena adanya

kepentingan tertentu yang ingin dicapai dengan cara memprovokasi untuk meletupkan kerusuhan. Dimana pada saat unjuk rasa tentunya melibatkan banyak orang, hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, selain itu banyaknya pengunjuk rasa juga sangat rawan dengan provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, provokasi dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu anggota unjuk rasa yang mempunyai kecenderungan perilaku menyimpang dalam kesehariannya, sehingga dimanapun orang tersebut berada maka akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya. Lalu provokasi juga mungkin dilakukan oleh pihak-pihak luar yang menginginkan suasana aksi unjuk rasa menjadi rusuh dengan niat ataupun kepentingan tertentu.

3. Faktor Kurang Koordinasi antara Pengunjuk Rasa dengan Aparat Kepolisian.

Faktor yang menjadi penyebab kerusuhan sebagai kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian tidak adanya pemberitahuan secara terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan unjuk rasa.

4. Faktor Sosiologi

Didalam interaksi sosial akan menyebabkan munculnya suasana kebersamaan diantara individu-individu yang terlibat.

Didalam sosiologi hukum kemudian muncul dengan istilah situasi sosial, yaitu tiap-tiap situasi dimana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam kasus unjuk rasa, pada umumnya pihak atau kelompok yang melakukan unjuk rasa mempunyai Visi dan Misi yang sama, sehingga dengan kesamaan ini para unjuk rasa cenderung memiliki solidaritas yang tinggi antara sesama anggotanya. Sehingga jika salah satu anggota melakukan tindakan anarkis maka anggota yang lain juga akan sangat mudah untuk mengikuti tindakan tersebut.

5. Faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat kepolisian.

Dari sudut yang lain, dapat kita amati bahwa adakalanya anarkis tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarkis. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarkis secara lebih meluas atau malah meng-*incite* atau membakar anarkis yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarkis yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase

yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal (*base data*) yang dimiliki polisi setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, polisi seperti menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan unjuk rasa justru membangkitkan banyak kritik. Jajaran kepolisian kerap dituding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.

6. Faktor Kurangnya Pengamanan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Faktor kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi masalah selanjutnya yang dapat menimbulkan kerusuhan. Dalam tata cara penyampaian pendapat dimuka umum harus diberitahukan estimasi massa yang akan ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 10, yaitu :

1. Penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

2. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.
3. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat.
4. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Serta melampirkan surat pemberitahuan sesuai Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagai berikut :

- a. Maksud dan tujuan
- b. Tempat, lokasi, dan rute
- c. Waktu dan lama
- d. Bentuk
- e. Penanggung jawab
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- g. Alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. Jumlah peserta

Hal ini bertujuan agar aparat keamanan (dalam hal ini Kepolisian) dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Dalam konteks penerapannya, sering kali terlihat jumlah personil kepolisian kurang memadai dalam menangani aksi unjuk rasa.

B. Upaya Penanganan Aparat Hukum dalam Menangani Unjuk Rasa Anarkis di Kota Makassar.

Peranan aparat hukum dalam hal ini adalah Kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa sangatlah besar. Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap unjuk rasa memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan.

Menurut Sadjijono (2008: 60-61), polisi merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam Negara hukum. Polri diberikan amanat oleh Undang-undang selaku alat Negara untuk mengemban tugas dan wewenang dalam bidang memelihara kamtibmas, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melindungi masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechmatigheid*). Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hierarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas, atau dapat pula dimaknai bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindakan kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Dalam mewujudkan kamtibmas maka penanganan aparat penegak hukum dalam menangani aksi unjuk rasa harus dapat ditangani secara maksimal, sebab aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk mengungkapkan pendapat dimuka umum untuk menuntut atau menyampaikan tuntutan kepada penguasa. Berakhirnya era pemerintahan Orde Baru membawa pengalaman baru bagi masyarakat Indonesia, yakni terjaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, ini dimungkinkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebelum ada Undang-undang tersebut, persoalan menyampaikan

pendapat dimuka umum ini hanya diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 Amandemen ke- IV. Pasal itu menyebutkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pikiran serta tulisan dijamin oleh negara dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, undang-undangnya sendiri tidak pernah dibuat oleh pemerintahan orde baru, meski demikian, sangat jarang terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi-aksi yang dilancarkan kebanyakan bersifat terbatas dalam aspek peserta yang tidak banyak, lokasi yang terbatas, biasanya dipelataran kampus untuk aksi-aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, serta dipelataran pabrik atau kantor jika aksi unjuk rasa itu dilancarkan buruh, serta isu ataupun persoalan yang disampaikan.

Pemerintah dan aparatnya dalam menanggapi aksi-aksi yang dikategorikan sebagai "aman terkendali" itu pun tidak terlalu bersusah payah. Biasanya aksi tersebut akan usai tanpa harus ada upaya yang bersifat keras dan paksaan. Tentunya dengan syarat ada mekanisme penyaluran aspirasi mereka. Persoalan apakah aspirasi tersebut dipenuhi atau tidak, itu urusan lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah kasus dimana aksi unjuk rasa disampaikan dalam kategori yang berbeda. Dengan massa yang banyak, dilakukan di tempat umum, dan menyampaikan tuntutan yang membuat penguasa khawatir. Aksi-aksi semacam itu biasanya berujung pada tindakan pembubaran yang bersifat keras. Tidak jarang pula melibatkan letusan senjata api. Akan tetapi, ada pula aksi besar yang

tidak perlu berujung pada tindak pembubaran dengan kekerasan melainkan dengan sikap pemerintah yang mengakomodasi tuntutan pengunjuk rasa. Dalam hal ini, memang sangat rumit menangani unjuk rasa. Belum lagi jika harus memperhatikan faktor keselamatan petugas maupun pengunjuk rasa, karena bagaimanapun harus diantisipasi seandainya ada perlawanan atau tindakan yang membahayakan keselamatan pengunjuk rasa. Dalam menghadapi aksi unjuk rasa, institusi penanggung jawab keamanan menyediakan pasukan yang memadai secara jumlah maupun kecakapan untuk menghadapi aksi unjuk rasa.

Menurut Yulianto (Wawancara, 17 November 2015), mengatakan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis, diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi melalui tulisan kepada para calon pengunjuk rasa.
2. Menggunakan pendekatan dialogis secara berulang (sebelum dan sesudah) pelaksanaan aksi unjuk rasa.
3. Menggunakan tameng dengan melakukan dorongan mundur kepada massa dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa anarkis.
4. Menyemprotkan gas air mata apabila massa semakin rusuh dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa.
5. Mengeluarkan tembakan peringatan.

Beranjak dari upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yulianto, maka penulis dapat mengetahui bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian untuk mengamankan aksi unjuk rasa, tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Upaya Pre-Emtif (pemberian himbauan dan arahan).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Yulianto, bahwa dalam hal ini Polri berpatokan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana pada tahap awal sebelum pihak-pihak terkait melakukan aksi unjuk rasa, pihak kepolisian memberikan himbauan dan mendekati kelompok-kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa.

2. Upaya Preventif (tindakan pengamanan dan pencegahan).

Dalam upaya preventif, pihak kepolisian melakukan tugas sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak aparat penegak hukum baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak aparat dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu aksi unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak aksi unjuk rasa tersebut.

3. Upaya Represif (tindakan tegas).

Tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan aparat yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara professional, proposional, dan

tanpa ragu-ragu serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pengunjuk rasa berbuat anarkis antara lain disebabkan adanya faktor kekecewaan, faktor kesengajaan (rekayasa), faktor kurang koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian, faktor sosiologi, dan faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat kepolisian.
2. Upaya dalam penanganan aksi unjuk rasa, aparat menggunakan beberapa strategi, antara lain: Adaya Upaya Pre-Emtif (pemberian himbauan dan arahan) agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa. Kemudian Upaya Preventif (tindakan pengamanan dan pencegahan) yang dimaksudkan agar pihak aparat penegak hukum baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak aparat dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu aksi unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak aksi unjuk rasa tersebut. Serta Upaya Represif (tindakan tegas), dimana tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan aparat yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara professional, proposional, dan tanpa ragu-ragu serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa pendapat sebagai saran, antara lain:

1. Diharapkan pemerintah agar lebih tanggap dalam mengeluarkan kebijakan agar para elemen baik itu mahasiswa tidak terpacu dalam melakukan unjuk rasa yang terkadang berujung dengan anarkis.
2. Diharapkan agar pemerintah lebih tanggap dalam menerima aspirasi masyarakat sehingga para pengunjuk rasa tidak melakukan aksi unjuk rasa dengan cara anarkis.
3. Masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa dalam melakukan aksi unjuk rasa setidaknya dapat lebih jeli membedakan mana kawan dan mana penyusup, serta dapat menghindari kelakuan yang dapat membuat publik sakit hati dan malah menjadi anti terhadap kegiatan unjuk rasa. Jika ini terjadi, alih-alih ingin

mendapat simpati dan dukungan publik, malah sebaliknya akan menjadi *public enemy* atau musuh masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur

Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watompone, Jakarta.

_____, 2008, *Menguak Realitas Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

_____, 2009, *Menguak Tabir Sosiologi Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Alfian Hamzah, 1998, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Eric Hoffer, 1998, *Gerakan Massa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

_____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosilogis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiono, 2003, *Statistik Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta, Bandung.

S. Margono, 1997, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

T. O Ihromi (Penyunting), 1984, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen IV), Pasal 28, dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Permata Press, Jakarta.

Internet

(www.clebesonline.com/2015/05/04/polrestabes-makassar-tidak-serius-tangani-kasus-unm). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 10.45 Wita.

(<http://ensiklo.com/2014/08/apa-arti-anarki-anarkis-bukanlah-tindak-kekerasan-dan-perusakan/>). Diakses pada tanggal 20 Desember 2015, Pukul 16.57 Wita.

LAMPIRAN